

42872

150 / P-A07 / 04 .

“MEMELAYUKAN” ORANG MELAYU

Oleh: Tenas Effendy

“MEMELAYUKAN” ORANG MELAYU

Oleh: Tenas Effendy

“MEMELAYUKAN” ORANG MELAYU

Oleh: Tenas Effendy

I. PENDAHULUAN

Barangkali, ketika Laksemana Hang Tuah mengucapkan amanahnya yang terkenal: “*Tuah sakti hamba negeri, Esa hilang dua terbilang, Tak Melayu hilang di bumi*”, belum banyak orang yang memahami, betapa satu saat kelak dunia Melayu yang besar dibawah imperium Melaka akan menjadi kecil dan terkotak-kotak. Sejarah membuktikan, beberapa tahun kemudian Melaka dikalahkan Portugis, Sultan Mahmud Syah I terusir dari Melaka dan di dalam perjalanan panjangnya melawan Portugis akhirnya meninggal di Pekantua Kampar. Kemudian bangkit pula Johor sebagai “*pewaris*” Melaka, namun dihadang oleh Portugis, Belanda dan akhirnya juga berundur ke Riau. Selanjutnya, melalui *Traktat London 1824*, Melayu yang besar itupun dibagi dua oleh Belanda dan Inggeris. Dari Singapura ke Utara (Tanah Semenanjung) dikuasai Inggeris, dan dari Singapura ke selatan dikuasai Belanda. Sejak itulah dunia Melayu yang jaya menjadi suram dan kawasan yang luas menjadi sempit. Walaupun kemudian masing masing kawasan berhasil bangkit membangun negaranya, namun pamor kemelayuan tidak lagi kemilau seperti zaman –zaman sebelumnya.

Riau, yang pernah menjadi *benteng terakhir* imperium Melayu, sesudah Indonesia merdeka menjadi Kresidenan Riau dan termasuk kedalam propinsi Sumatera Tengah. Waktu itu kondisi pendidikan di Riau amatlah

menyedihkan. Sekolah lanjutan di Riau tidak lebih dari tingkat SMP dan SMA, itupun hanya ada satu dan dua buah saja di seluruh Riau. Untuk melanjutkan pendidikan, putera-putera daerah ini harus keluar, ada yang ke Sumatera Barat, ke Medan dan ke Jawa. Selain itu masih sangat banyak kelemahan dan kekurangan lainnya sehingga untuk "*maju dan mensejahterakan kehidupan rakyatnya*" yang mengalami derita sengsara dimasa penjajahan Belanda dan Jepang, yang berlanjut dengan masa perjuangan revolusi fisik melawan Belanda, dirasakan amat sulit. Muncullah gagasan, bahwa Riau harus berjuang untuk menjadi propinsi sendiri, agar dapat membenahi diri secara lebih leluasa dan memanfaatkan hasil alamnya yang berlimpah. Bila sudah Menjadi propinsi sendiri diharapkan akan dapat *memacu pendidikan, memacu pembangunan dan mensejahteraan rakyatnya.*

Setelah melalui perjuangan yang gigih, yang didukung oleh seluruh rakyat Riau waktu itu, maka melalui UU No.61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Provinsi Riau, terwujudlah harapan rakyat Riau untuk menjadi propinsi sendiri, yang semula ibukotanya di Tanjungpinang kemudian tahun 1960 dipindahkan ke Pekanbaru.

Sayangnya, sampai tahun 1979, setelah hampir 21 tahun Riau menjadi propinsi sendiri, impian untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya, "*masih jauh panggang dari api*". Hasil penelitian waktu itu menunjukkan, bahwa hampir 90% rakyat Riau berada dalam kondisi "*nyaris miskin*" dan "*miskin*". Bahkan di beberapa kawasan termasuk kelompok "*miskin sekali*" Dan kemiskinan itu nampaknya tidak mau beranjak dari Riau, sehingga kebanyakan desa-desa di Riau termasuk desa IDT. Bahkan sampai tahun 2000 inipun masih sekitar 42% rakyat Riau *berada di bawah garis kemiskinan.* Padahal, sudah sangat banyak sumber alam daerah ini yang

diolah dan dikuras hasilnya. Hutan tanah di Riau nyaris tidak tersisa karena diolah dan dikuasai perusahaan besar dan mega industri. Hasil minyak dan gas bumi, sudah sejak lama diangkut keluar, demikian pula hasil galian lainnya. Kesemuanya itu menimbulkan permasalahan yang berlarut-larut, sejak pemerintahan masa silam sampai sekarang. Bahkan, sekarang permasalahan itu semakin mencuat, karena orang sudah bebas menyampaikan hati nuraninya.

Selain itu, di Riau terjadi pula berbagai kesenjangan, baik kesenjangan sosial ekonomi, kesenjangan politik maupun kesenjangan kebudayaan. Beragam kesenjangan ini semakin menambah permasalahan di Riau, yang kemudian menjalar kearah pemekaran wilayah kabupaten dan kota, berlanjut pula kepada "*pemekaran propinsi*", yakni "*Propinsi Kepulauan Riau*" dan "*Propinsi Bengkalis*". Dari satu sisi gagasan pemekaran ini bertujuan untuk *meningkatkan kesejahteraan masyarakat* masing-masing kawasan, serta memberi peluang yang lebih besar bagi "*anak tempatan*" untuk *memegang posisi* di kawasannya.

Gagasan untuk pemekaran Kabupaten dan Kota sudah terwujud, sedangkan gagasan untuk "*pemekaran propinsi*" masih dalam tahap perjuangan. Bahkan Kepri sudah laju menembus jalur-jalur perjuangannya sampai ke pusat, dan tidak mustahil akan terwujud. Sedangkan Bengkalis, masih dalam tahap "*bisik-bisik*" karena belum adanya kesepakatan antar sesama mereka di kawasan itu.

Perkembangan ini tentulah patut dicermati dan dihayati dengan dada lapang dan kepala dingin. Gagasan yang menimbulkan pro dan kontra ini sebaiknya tidak ditanggapi dengan emosional, tetapi direnungkan secara arif,

dan dibahas secara menyeluruh dalam *suasana kemelayuan* yang kental. Perbedaan pendapat amatlah dihormati dalam budaya Melayu, karenanya janganlah perbedaan itu menjadi pemecah belah "*persebatian melayu*". Masing-masing pihak diharapkan secara bijaksana memandang dari berbagai sisi mengapa peristiwa itu terjadi, dan menjauhkan segala "*sangka buruk*" yang justru semakin mengeruhkan suasana. Apalagi, masing-masing pihak memiliki alasan yang beragam, bila diperdebatkan tidak akan ada titik temunya dan tentu tidak akan ada pula penyelesaiannya. Tetapi bila perbedaan pendapat itu dimusyawarahkan dengan semangat "*persebatian melayu*" barangkali banyak cara untuk menemukan kesepakatan, dan banyak jalan dapat ditempuh, sehingga sesama Melayu tidak terjebak ke dalam "*pertelikaian sekandang*". Kalaupun "*Propinsi Kepri*" terwujud karena memang sudah diupayakan sampai ke pusat, pihak yang tidak setuju diharapkan dapat menerima kenyataan itu dengan dada lapang, dan berusaha untuk membantunya agar tidak menjadi propinsi "*perburuan*" dan "*ladang*" orang lain. Sebaliknya, bila upaya itu tidak berhasil, ataupun pelaksanaannya tertunda, diharapkan pihak pendukungnya dapat bersabar menerima kenyataan itu, sehingga berlapang dada pula membenahi daerahnya sebagai bagian dari Propinsi Riau seperti semula.

Tulisan ini tentulah tidak akan banyak mengungkit masalah itu, tetapi lebih ditukikkan kepada kebudayaan Melayu Riau sebagai "*jati diri*" kemelayuan, yang selama ini nyaris terpuruk, sehingga kehilangan banyak aspek dan banyak nilai hakikinya. Padahal, kebudayaan itu amatlah penting untuk menjadi landasan dalam kebijakan pembangunan, terutama dalam menyimpai asas "*persebatian melayu*", agar orang-orang Melayu Riau tetap

dilandasi oleh “*kesamaan agama (Islam), adat istiadat (budaya) dan bahasa Melayu*”. Asas inilah yang turun menjadi “*jati diri*” kemelayuan seseorang, sehingga yang disebut “*Orang Melayu*” itu bukan lagi sepenuhnya mengacu kepada asal usul keturunan atau etnis dan suku.

Namun, kejayaan Melaka yang Menjadi “*pemersatu*” Melayu itu kemudian kandas dibantai Portugis (1511 M). Walaupun kemudian muncul Johor sebagai pewarisnya, Johor tidak mampu mengambil alih kepemimpinan Melaka karena Johor pun tak luput dari berbagai hantaman Portugis, Belanda, Aceh dan sebagainya. Akhirnya Johor terjerembab, dan sama sekali tidak mampu menempatkan dirinya sebagai teraju kepemimpinan dunia Melayu. Maka kerajaan-kerajaan Melayu di Tanah Semenanjung dan di Riau yang semula mengacu ke Melaka dan Johor, akhirnya berdiri sendiri-sendiri, sehingga kemelayuan yang besar itu semakin lemah dan terpecah. Dan kemalangan itupun mencapai puncaknya ketika Belanda dan Inggeris membagi wilayah Melayu menjadi dua bagian melalui Traktat London 1824 M., dari Singapura ke utara dikuasai Inggeris, dan Singapura ke selatan dikuasai Belanda.

Di Riau, kerajaan-kerajaan Melayu tumbuh dalam kawasan masing-masing, seperti kerajaan Inderagiri, kerajaan Riau Lingga, kerajaan Pelalawan, kerajaan Siak Sri Inderapura, kerajaan Rambah, Rokan IV Koto, Gunung Sailan dan sebagainya, yang berusaha melanjutkan keberadaannya dalam kondisi yang beragam. Ada yang dapat berkembang pesat, ada yang “*biasa-biasa*” saja, ada pula yang kian mengecil. Bahkan, dengan semakin kokohnya kekuasaan penjajahan Belanda, beberapa kerajaan dihapuskan, sedangkan yang tersisa berada di bawah kendali Belanda. Keadaan itu berlanjut sampai Indonesia merdeka, yang mengakhiri kerajaan-kerajaan

Melayu di Riau karena semuanya bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Walaupun kerajaan Melayu di Riau sudah berakhir, walaupun kejayaan Melayu sudah memudar, namun dari segi kebudayaan, budaya Melayu tetaplah ada dan acuan asasnya tetaplah diwarisi oleh setiap kerajaan dan masyarakat tempatan. Masyarakat Melayu yang majemuk dengan latar belakang kebudayaan yang majemuk itu, tetap bertahan di masing-masing kawasan. Pusat-pusat pengembangan kebudayaan, terutama kerajaan, tidak lagi dapat diandalkan, namun orang Melayu tetaplah mengakui bahwa "*kemelayuan*" itu hakikatnya ditentukan oleh asas: "*seagama (Islam), seadat (berbudaya Melayu) dan sebahasa (bahasa Melayu)*". Siapa saja yang mengingkari asas ini, dianggap "*bukan*" orang Melayu.

Kenyataan memang menunjukkan demikian. Walaupun sesudah merdeka Riau hanya menjadi salah satu kresidenan dari Propinsi Sumatera Tengah, tetapi mereka menyadari betul bahwa orang Melayu Riau memiliki kebudayaan sendiri, yakni *Kebudayaan Melayu Riau*. Kebudayaan itulah yang mereka anut dan warisi turun temurun, yang sejaligus "*mensahihkan*" mereka sebagai orang Melayu.

Dalam tahun 1946 di Sumatera Timur terjadi "*revolusi sosial*", banyak keluarga raja-raja Melayu di sana yang terbunuh, termasuk tokoh Pujangga Baru Tengku Amir Hamzah. Dampaknya, unsur-unsur budaya Melayu yang dulu berpusat di istana atau punya kaitan dengan istana dianggap "*budaya feodal*", karenanya harus dihilangkan. Sayangnya, batasan "*feodal*" dan "*non feodal*" amat tidak jelas, sehingga orang menjadi ragu dan gamang untuk memilih kebudayaan mana yang akan dilanjutkan. Akibatnya, penggalian, pembinaan dan pengembangan kebudayaan di Riau nyaris

terabaikan. Apalagi, di Riau sudah banyak didatangi pendatang baru dengan membawa kebudayaan masing-masing dan mencoba mengangkatnya di Riau.

Kemudian, setelah Riau menjadi Propinsi Riau, upaya penggalian, pembinaan dan pengembangan kebudayaan Melayu mulai digalakkan. Beberapa aspek budaya Melayu mulai ditampilkan, terutama aspek kesenian. Namun, upaya itu belumlah mencapai hasil yang diharapkan, karena dihadapkan kepada beragam permasalahan. Upaya dimaksud diantaranya adalah: tahun 1960 membentuk "*Lembaga Karya Budaya Riau*" dan "*Pondok Seni Rupa Riau*", tahun 1961 mengadakan "*Festival Budaya Riau*" untuk membantu perjuangan Irian Barat, tahun 1968 membentuk "*Badan Pembina Kesenian Daerah Riau*", tahun 1970 membentuk "*Lembaga Adat Daerah Riau*" (dalam Mubes tahun 1994 menjadi "*Lembaga Adat Melayu Riau*"), dan seterusnya, sampai kepada pembentukan "*Dewan Kesenian Riau*", serta puluhan atau bahkan ratusan Sanggar Seni Budaya dan kegiatan lainnya. Kesemuanya itu merupakan perwujudan kepedulian masyarakat Riau umumnya, orang Melayu Riau khususnya untuk mengangkat kebudayaan daerah ini. Sayangnya, kebanyakan kegiatan itu selalu berada di kawasan perkotaan, nyaris tidak menjamah daerah pedesaan, padahal, desa atau kampung adalah basis-basis budaya Melayu. Di sanalah sebenarnya nilai-nilai hakiki kebudayaan Melayu, akar kebudayaan Melayu hidup dan tersisa. Akibatnya, pengembangan kebudayaan Melayu cenderung beralih menjadi pengembangan "*kesenian*" semata, dan itupun kebanyakan bertumpu di perkotaan.

Pergeseran ini menyebabkan banyak aspek-aspek budaya Melayu terabaikan, sehingga ada yang mendekati kepunahan atau bahkan punah sama sekali. Hal ini tentulah sangat merugikan, karena di antaranya ada yang sarat dengan nilai-nilai dasar budaya Melayu, yang hakikatnya menjadi acuan dalam merekat "*persebatian melayu*" dalam arti luas. Tidak terangkatnya kebudayaan Melayu secara menyeluruh, menyebabkan orang Melayu banyak kehilangan unsur budaya dan nilai-nilai hakikinya, sehingga prilaku mereka pun tidak lagi sepenuhnya memperlihatkan prilaku sebagai orang Melayu yang benar-benar Melayu. Perubahan zaman dan beragam perkembangan ilmu dan teknologi, menyebabkan mereka setiap saat dihadapkan kepada kebudayaan luar yang terus mengalir sampai ke sudut dan ceruk meruk rumahnya. Keadaan ini menyebabkan sebagian orang Melayu semakin kehilangan nilai budayanya, dan semakin tercabut dari akar kebudayaannya, dan semakin menipis pula prilaku kemelayuannya.

Terjadinya proses "*kehilangan*" nilai ini menyebabkan orang-orang Melayu secara sadar atau tidak, mulai melupakan asas "*persebatian melayu*"nya, sehingga "*rasa senasib sepenanggungan, seaiib dan semalu*" menjadi longgar. Walaupun ada, ruang lingkupnya menciut menjadi kawasan yang sempit, yakni sebatas "*kampung halaman*" masing-masing. Rasa kebersamaan semakin menipis, rasa seriau semakin menyempit, sehingga keutuhan Melayu semakin rapuh. Asas kemelayuan yang luas, menjadi menyempit, orang mulai mengkaji "*asal usul*", mempertanyakan "*silsilah*" dan *puak asalnya*. Sehingga asas *seagama (Islam), seadat (budaya Melayu) dan sebahasa yakni bahasa Melayu*" semakin terkikis.

Gejala krisis nilai budaya ini sebenarnya sudah lama terjadi, terutama dalam memperebutkan posisi di kantor Gubernur atau di kantor-kantor lainnya, termasuk berebut posisi di perguruan tinggi di Riau. Sudah sejak lama berkembang isu, bahwa ada kelompok-kelompok yang berusaha dan sebagian berhasil menguasai personal di kantor Gubernur atau di kantor-kantor lainnya atau perguruan tinggi dimaksud, sehingga kelompok itulah yang “mendominasi” personil di sana. Sedangkan kelompok lainnya “tersisih” dan terabaikan, sehingga muncullah rasa “kecemburuan” antar sesama orang Melayu, yang lambat laun merenggangkan jarak antara yang satu dengan yang lainnya, dan “keretakan” itu tidak pernah pulih bahkan cenderung semakin menganga.

Walaupun kenyataannya sudah demikian, orang-orang Melayu masih “mebutakan” matanya dan “memekakkan” telinganya terhadap kenyataan itu. Bahkan, mereka selalu melontarkan isu bahwa “keretakan” dan “kesenjangan” itu terjadi karena “direkayasa” oleh “pihak luar”, yang ingin memecah belah Riau. Sikap inilah sebenarnya yang kurang arif, sehingga selalu menimpakan “kesalahan” ke pihak lain, tanpa mau mengoreksi dirinya sendiri. Akibatnya, walaupun nampaknya orang Melayu Riau tetap “bersatu” tapi hakikatnya bersatu dalam wujud yang semu, yang goyah karena “persatuan” itu lebih banyak *dimulut* daripada kenyataannya. Dan walaupun ada “rekayasa” pihak luar, tentulah karena mereka melihat adanya celah-celah dan lubang-lubang yang dibuat oleh orang Melayu itu sendiri. Di dalam percaturan politik atau di dalam kancah memperebutkan peluang yang terbuka lebar di daerah ini, sekecil apapun celah dan kelemahan orang Melayu akan dimanfaatkan orang lain.

Seandainya orang-orang Melayu itu mau berfikir dengan jernih dan jujur dalam melihat kenyataan, barangkali sejak dini akan diupayakan untuk memperbaikinya. Tetapi, karena selalu mencari "*kambing hitam*" ke pihak lain, mereka secara sadar atau tidak, semakin terjebak ke dalam "*pertarungan sekandang*" yang kian hari kian "*melumpuhkan*" persebatian Melayu itu. Dan keadaan semakin menyedihkan, karena yang terlibat dan menjadi "*dalang*"nya adalah "*tokoh-tokoh*" daerah yang saling berebut pengaruh atau posisi. Itulah sebabnya, bila terjadi suksesi di Riau, atau terjadi promosi jabatan atau kepemimpinan, selalulah muncul persaingan antar sesama Melayu, dan masing-masing pesaing mencari-cari kelemahan dan kesalahan saingannya, sehingga terwujudlah perilaku "*bagaikan orang memanjat batang pinang*", yang satu naik, yang lain menariknya ke bawah". Akhirnya energi habis di sana, dan peluang itu dimanfaatkan orang lain. Seperti kata pepatah: "*kapal pecah, hiu yang kenyang*".

Kalaulah semua pihak mau merenung dari lubuk hatinya yang paling dalam, tentulah masih terbayang bagaimana serunya pertarungan diwaktu pemilihan Gubernur Riau beberapa waktu yang lalu. Masing-masing calon berusaha mengungguli saingannya dengan berbagai cara, demikian pula pendukung-pendukungnya, sehingga "*pertarungan*" sekandang itu menjadi sedemikian tajamnya. Dan se usai pemilihan, memulihkannya memerlukan waktu yang panjang. Kemudian beredar pula isu bahwa pihak yang menang, dengan bangga menepuk dada, lalu membentuk barisan "*kroni-kroni*"nya, melingkari sang pemenang, sehingga sang pemenangpun hanyut di dalamnya. Dan apabila terjadi sesuatu permasalahan selalu menuding

kelompok yang dulu menjadi “saingan” suksesinya. Isu seperti ini sebenarnya tidak akan merebak, bila “*persebatian melayu*” mengental, dan tidak ada rasa saling “*buruk memburukkan*”. Dan seandainya isu itu benar, tentulah perilaku seperti ini sangat tidak menguntungkan, bahkan semakin mempertajam pertentangan antar sesama orang Melayu dan semakin mengekalkan “*sangka buruk*” antar sesama orang Melayu itu. Perilaku ini hendaklah segera dikikis dan dijauhkan, agar orang Melayu yang sudah menjadi minoritas di Riau tidak semakin terpuruk dan terpinggir. Memang, di permukaan nampaknya “*tenang-tenang*” saja, tetapi secara *berbisik-bisik*, atau melalui “*perbualan di belakang-belakang*” semakin banyak isu yang berkembang, semakin banyak “*gosip*” yang beredar, yang intinya saling “*salah menyalahkan*”, saling “*buruk memburukkan*” dan saling “*bersangka buruk*”. Akibatnya “*persebatian melayu*” di Riau sekarang tak ubahnya seperti “*kayu dimakan bubuk, di luarnya utuh, di dalamnya sudah luluh lantak*”. Persebatian *semu* seperti ini tentulah tidak akan mampu menghadapi tantangan masa depan yang penuh dengan beragam cabaran.

Dalam kondisi seperti ini tentulah sulit untuk menyatukan orang-orang Melayu di Riau. Bahkan sebaliknya, ada kecenderungan bahwa jarak yang dibuat masing-masing kelompok itu bukan saja tidak diupayakan untuk menghilangkannya, tetapi justru semakin bertambah lebar. Isu dan gossip semakin merebak, yang kesemuanya menjerumuskan orang-orang Melayu ke dalam kancah pertelikaian sesamanya. Isu dan gosip ini tidaklah jelas darimana sumbernya, tetapi sering menjebak orang-orang Melayu untuk saling “*tuduh menuduh*” atau saling “*curiga mencurigai*”.

Menghadapi kenyataan ini seharusnya kelembagaan yang ada seperti "*Lembaga Adat Melayu Riau*", dapat tampil dan berperan untuk meredamnya. Namun, lembaga ini nampaknya nyaris tidak berfungsi, bahkan secara sadar atau tidak, terbetik pula berita bahwa fungsinya sudah beralih ke kelompok lain yang "*memproklamkan dirinya*" sebagai forum yang mewakili semua *tokoh* di Riau. Dengan demikian, lembaga yang sudah mendekati usia 30 tahun itu nampaknya kehilangan pamor, tersuruk dan seakan "*kehilangan muka*". *Forum* inilah, konon, yang menyelenggarakan "*Kongres Rakyat Riau*" yang hasilnya sampai sekarang dipertanyakan berbagai pihak. Sebab yang terdengar, barulah setakad isu-isu mengenai "*pertelikaian*" antar sesama pengurus dan panitia, baik mengenai hasil kongres maupun mengenai dana yang milyaran rupiah yang disumbangkan berbagai pihak kepadanya.

Sebagaimana disebut di atas, dalam keadaan sedemikian itulah mencuat upaya Kepulauan Riau untuk melepaskan dirinya dari Propinsi Riau dan membentuk "*Propinsi Kepulauan Riau*", sayangnya suara itu tidak diagendakan di dalam Kongres. Padahal, bila dibicarakan tentulah banyak masukan dan pertimbangan dapat diberikan, sehingga tidak mustahil para pemrakarsa gagasan itu mau "*berundur maju*" atau "*mempertimbangkan*" buruk baiknya bagi kepentingan daerah ini dalam arti luas. Selanjutnya bergema pula suara untuk membentuk "*Propinsi Bengkalis*". Gagasan ini pun kebanyakan ditanggapi dengan *emosional*, sehingga menambah "*riuh*" nya Riau ini. Padahal, bila semuanya ditanggapi dengan kepala dingin dan dada yang lapang, banyak dialog dapat dilakukan, banyak hal dapat dikupas, banyak rundingan dapat dibuat, sehingga apapun gagasan yang timbul tidak

akan menambah “gelabah” orang Riau. Sayangnya orang Melayu Riau dalam tahun-tahun terakhir ini sudah larut dibakar emosi, sehingga “kelapangan dada Melayu” tidak lagi nampak ke depan. Hal ini menjadi semakin “bergalau” karena sebagian dari mereka yang turut bicara dan menanggapinya, tidak tahu pula pokok permasalahan dan latar belakang mengapa gagasan itu muncul. Namun demikian, betapapun riuhnya Riau, betapapun resahnya hati, betapapun gelabahnya perut, baki-baki budaya Melayu masih ada, sehingga sampai saat ini pertelikaian pendapat antara yang “pro” dengan yang “kontra” masih dalam batas kewajaran, maksudnya, belum sampai pada tingkat dimana antara sesama orang Riau itu “beramuk”.

Dari sisi lain, hampir sejalan dengan peristiwa di atas, muncul pula permasalahan di kabupaten yang baru dimekarkan. Mereka disibukkan pula oleh perebutan untuk mengisi berbagai jabatan yang kosong, yang dipaksakan harus diisi oleh “anak daerah”nya masing-masing. Maka berebut pulalah antara “anak-anak” di kecamatan di daerah itu, sehingga gelanggang pertarungan antar sesama Melayu semakin menyempit dan merata sampai ke pelosok daerah Riau. Hal ini langsung ataupun tidak, semakin membuka peluang terjadinya “perpecahan di Riau”, dan semakin mengentalkan “rasa kedaerahan yang sempit”, yang dapat melumpuhkan “persebatian melayu” dalam arti yang luas dan menyeluruh.

Dengan semakin mencuatnya “kotak-kotak kampung halaman” itu menyebabkan di Riau terjadi “krisis ketokohan”, sehingga nyaris tidak ada tokoh yang diakui oleh semua kelompok sebagai tokoh bersama. Masing-

masing kelompok memang mempunyai tokoh, tetapi untuk menjadi “*tokoh Riau*” yang ucapannya didengar semua pihak, yang pribadinya menjadi ikutan dan teladan, yang karismanya dapat meredam emosional orang, yang “*lidahnya asin*” nyaris tak ada. Padahal, *Riau sangat memerlukan tokoh sentral, yang dapat mempersatukan empat sungai dan satu selat, yang mampu merangkul semua tokoh daerah yang ada di daerah ini.* Tokoh itulah yang tidak nampak. Kalaupun ada yang dianggap tokoh, barangkali belum benar-benar memenuhi harapan itu, karena sadar atau tidak, masih terlilit oleh lingkaran “*kampung halaman*”nya, masih terjerat oleh “*sungai asal*”nya, masih terbelenggu oleh “*tim suksesi*”nya, dan sebagainya. Kenyataan inilah yang semakin memilukan hati, sehingga Riau yang besar, Riau yang menjadi “*tulang punggung*” kemelayuan di nusantara ini, hanya besar di atas kertas, sedangkan kenyataan menunjukkan sudah menjadi Riau yang rapuh dan nyaris “*liau*” (habis) dari nilai-nilai hakiki budaya Melayu itu sendiri.

III. PERANAN KEBUDAYAAN SEBAGAI PEREKAT PERSEBATHAN MELAYU.

Merujuk kepada apa yang sedang melanda Riau sekarang, patutlah direnungkan kembali oleh semua pihak bagaimana upaya “*merekat*” persebathian Melayu itu, agar tidak “*terburai*” dan “*memporak porandakan*” kesatuan Melayu di Riau ini. Upaya ke arah itu sebaiknya segera dilakukan, dan satu-satunya cara adalah melalui kebudayaan. Sebab, kebudayaan

memiliki nilai-nilai pemersatu, yang tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan kelompok. Nilai-nilai budaya inilah yang seharusnya tumbuh di setiap diri dan pribadi, sehingga mereka menjadi orang yang “*tahu diri*”. Dan orang yang “*tahu diri*” tentulah dapat dipercaya dan diyakini dapat memelihara “*persebatian Melayu*”.

Di dalam budaya Melayu, amat banyak nilai-nilai yang dapat menjadi perekat persebatian Melayu, yang sebenarnya masih dianut oleh sebagian anggota masyarakatnya, terutama di kampung-kampung. Nilai-nilai persebatian itu antara lain:

01. “*Seaiab dan semalu*”, yakni nilai yang saling memelihara hubungan antar sesama anggota masyarakatnya agar tidak saling membuka aib malu orang lain. Nilai ini dapat menumbuhkan kesadaran, bahwa mempermalukan sesamanya, bermakna mempermalukan dirinya sendiri.
02. “*Senasib sepenanggungan*”, yakni nilai yang menumbuhkan rasa kegotong royongan antar sesama anggota masyarakatnya, menumbuhkan rasa kesetiakawanan sosial, menumbuhkan rasa persaudaraan yang kental, tidak mementingkan diri sendiri atau kelompoknya saja.
03. “*Seanak sekemanakan*”, yakni nilai yang tidak memilah-milah antara puak atau kelompok yang satu dengan yang lainnya.

04. "*Seinduk dan semamak*", yakni nilai yang saling menghormati tokoh dari setiap puak atau kelompok. Nilai ini akan dapat membendung munculnya rasa kedaerah yang sempit, akan dapat membongkar dinding-dinding pembatas "*kotak-kotak*" orang Melayu yang selama ini menjadi "*duri dalam daging*".
05. "*Sepinggalan sepiring makan, setikar seketiduran*", yakni nilai yang menumbuhkan rasa kebersamaan, yang saling berbagi senang dan susah, dan menjauhkan diri dari keinginan untuk "*menang sendiri, kenyang seorang*".
06. "*Seadat sepusaka, sepucuk setali darah*", yakni nilai yang menjadikan nilai budaya sebagai anutan semua orang, sehingga terwujud kerukunan antar sesama anggota masyarakatnya. Nilai ini juga menyadarkan orang agar tidak terjebak kepada perbedaan-perbedaan adat dan budaya tempatan, tetapi menganggap perbedaan itu sebagai khasanah budaya bersama yang perlu dijunjung dan dihormati.
07. "*Sesampan dan sehaluan*", yakni nilai yang menyadarkan orang bahwa mereka hidup dalam satu kesatuan yang utuh mencapai satu tujuan bersama. Nilai ini akan menghilangkan sikap yang saling berebut kuasa dan berebut pengaruh, yang saling mementingkan diri dan puak atau kelompoknya.
08. "*Berlaba sama mendapat, hilang sama merugi*", yakni nilai yang menyadarkan semua pihak, bahwa apapun hasil dan peluang yang dapat

dimanfaatkan di daerah ini adalah untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan diri atau puak atau kelompoknya saja. Dan apapun permasalahan yang terjadi haruslah menjadi beban dan tanggungjawab bersama untuk mengatasi dan menyelesaikannya.

09. *“Menegakkan tuah dalam musyawarah, menegakkan adat dalam mufakat”*, yakni nilai yang menjunjung tinggi asas musyawarah dan mufakat. Melalui musyawarah dan mufakat itulah dirumuskan beragam gagasan, diselesaikan berbagai permasalahan, dan dipadukan niat dan tekad untuk kepentingan bersama.
10. *“Bercakap bersetinah, berunding bersetabik”*, yakni nilai yang menyadarkan orang untuk *berprilaku terpuji, arif, bijak, bersopan santun dan saling hormat menghormati*. Nilai inilah yang dapat menyadarkan orang untuk tidak bersikap *“kasar langgar”*, untuk tidak *“caci mencaci”*, untuk tidak *“hujat menghujat”* atau *“fitnah memfitnah”* dan sebagainya yang merusak tatanan pergaulan dan hubungan antara sesama anggota masyarakatnya.. Nilai inilah yang menjadi acuan keperibadian Melayu yang berakhlak, dan berbudi pekerti mulia.

Contoh di atas hanya sebagian kecil dari ribuan ungkapan nilai *persebatian Melayu*, yang selama ratusan tahun menjadi *“jati diri”* kemelayuan orang Melayu Riau. Budaya Melayu amatlah sarat dengan nilai- nilai hakiki, apabila semuanya dapat dihayati, dibina dan dikembangkan, tentulah orang Melayu Riau akan benar-benar

mencerminkan dirinya sebagai “Orang Melayu” yang prilakunya dapat mewujudkan “*persebatian melayu*” dalam arti luas. Sayangnya, nilai-nilai hakiki yang sarat dengan nilai budi pekerti dan persebatian itu, sekarang nyaris diabaikan orang. Nilai-nilai itu dibiarkan terpuruk atau sengaja dipurukkan, karena sebagian orang Melayu sudah beralih kepada nilai yang dianggapnya “*baru*”, yang belum tentu serasi dengan asas agama Islam dan budaya Melayu. Bahkan tidak sedikit di antaranya adalah “*budaya balon*” yang di luarnya kemilau sedangkan di dalamnya hampa.. Akibatnya, sebagian orang Melayu sudah terseret kedalam perilaku yang “*kasar langgar*”, terjerumus ke lembah prostitusi, terjebak ke dalam perjudian, terpasung oleh narkoba dan minuman keras, dan terbenam ke dalam tindakan kriminalitas dan sebagainya yang tidak sesuai dengan asas perilaku kemelayuan itu sendiri.

Apabila hal ini terus berlanjut, tidak mustahil, satu saat kelak, apa yang disebut “*Orang Melayu Riau*” tidak lagi mencerminkan “*Orang Melayu*” yang menganut budaya Melayu. Dengan demikian, tentulah apa yang diamanahkan Laksemama Hang Tuah: “*Tak Melayu hilang di bumi*” tidak akan terwujud. Sebab yang dimaksud Hang Tuah dengan “*Orang Melayu*” adalah “*orang yang berkepribadian Melayu, yang “jati diri”nya mengacu dan berakar dari kebudayaan Melayu*”. Di dalam ungkapan adat dikatakan: “*Melayu lahirnya, melayu pula batinnya*”, jadi bukan Melayu keturunan yang prilakunya tidak lagi mencerminkan asas-asas nilai budaya Melayu.

IV. UPAYA MENYATUKAN ORANG MELAYU RIAU

Supaya orang Melayu dapat mencerminkan prilaku Melayu dan bersatu sebagaimana diasaskan oleh "*persebatian melayu*" tentulah diperlukan berbagai upaya. Di antaranya adalah menanamkan nilai-nilai hakiki budaya Melayu kepada setiap insan Melayu.

Untuk menanamkan nilai-nilai persebatian itu tentulah perlu dilakukan upaya-upaya yang mendasar, agar orang Melayu mau menyadari kelemahannya selama ini, dan berminat untuk memperbaikinya serta bertekad pula untuk menyerap nilai-nilai budayanya secara arif dan bijak. Upaya dimaksud disarankan antara lain:

01. "*Memelayukan Orang Melayu*", yakni menumbuhkan kesadaran kepada setiap orang Melayu, bahwa mereka selaku orang Melayu, wajiblah *memperlihatkan prilaku sebagai orang Melayu sejati, yakni: teguh beriman, berbudaya Melayu dan berbahasa Melayu*. Kepada mereka harus ditanamkan *rasa memiliki kebudayaannya, cinta dan bangga kepada kebudayaannya, serta mencerna dan menghayati nilai-nilai hakikinya*. Dengan demikian diharapkan mereka dapat menjadikan kebudayaan itu sebagai "*jati diri*"nya.

Selama ini kita melihat, bahwa orang Melayu Riau nyaris kehilangan prilaku Melayunya. Yang paling menonjol adalah kehilangan "*sopan santun*", kehilangan "*tegur sapa*", kehilangan "*tenggang rasa*", kehilangan "*rasa seaib dan semalu*", kehilangan "*rasa senasib dan sepenanggungan*", kehilangan "*rasa kebersamaan*", kehilangan "*rasa*

seadat sepusaka, seanak sekemanakan”, kehilangan asas “*seagama* (Islam), *seadat* (budaya Melayu) dan *sebahasa* yakni bahasa Melayu, dan sebagainya. Akibatnya, muncullah perilaku yang cenderung *saling jatuh menjatuhkan, saling hujat menghujat, saling tuduh memuduh, saling bersangka buruk, saling leceh melecehkan* dan seterusnya.. Kita juga melihat kecenderungan menipisnya rasa kesetiakawanan antar sesama orang Melayu seRiau, karena beralih kepada rasa kedaerahan yang sempit, yang ruang lingkupnya sebatas “*kampung halaman*” atau sebatas “*sungai kelahiran*”nya semata. Kita juga melihat adanya kecenderungan untuk menjadikan perbedaan adat resam dari satu wilayah kesatuan adat dengan adat resam wilayah kesatuan adat lainnya di Riau sebagai alasan membentuk kelompok-kelompok kecil yang semakin melemahkan “*persebatian melayu*” itu sendiri. Padahal, sejak dikukuhkannya *Lembaga Adat Melayu Riau* tahun 1971 kemudian di paterikan pula di dalam *Musyawahar Besar Lembaga Adat Daerah Riau* tahun 1982 telah disepakati secara bulat, bahwa *apapun bentuk dan wujud adat resam yang hidup dan berkembang di Riau secara turun temurun, diakui sebagai adat resam Melayu Riau. Kalaupun ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya, dianggap sebagai keberagaman adat yang memperkaya khasanah adat resam Melayu Riau.*

Banyaknya kehilangan nilai itulah yang menjadi salah satu penyebab utama mengapa orang Melayu Riau masa kini nyaris “*terkelupas*” dari kemelayuannya, nyaris *tercabut* dari akar budayanya. Makanya, tidaklah berlebihan bila tumbuh anggapan, bahwa Melayu

masa kini hanyalah "*melayu kulit*" atau "*melayu keturunan*" sedang prilakunya sudah menjadi "*orang lain*", karenanya upaya untuk "*Memelayukan Orang Melayu Riau*" patut dan layak untuk digalakkan oleh semua pihak.

Kenyataan di atas, perlu disimak secara jujur dan arif, dan jangan disalah tafsirkan sebagai "*pelecehan*" terhadap orang Melayu di Riau ini. Karenanya, "*persebatian Melayu*" atau kerukunan antar sesama orang Melayu hanya dapat terwujud, apabila upaya-upaya untuk "*memelayukan orang Melayu*" itu berhasil, dan mereka benar-benar sudah menjadi "*Orang Melayu yang Melayu lahir dan batinnya*".

02. "*Memfungsikan Lembaga Adat Melayu Riau*", yakni mengupayakan agar Lembaga Adat Melayu Riau dapat difungsikan untuk menjadi wadah "*pemersatu*" orang Melayu, dan mewadahi upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan Melayu, khasnya adat istiadat Melayu Riau. Upaya ini tentulah harus dimulai dengan membenahi kepengurusannya, agar yang duduk di lembaga itu adalah wakiki-wakiki masyarakat adat yang menguasai hal ihwal adat dan budaya Melayu.

Kita melihat selama ini lembaga ini kebanyakan didominasi oleh orang-orang birokrat atau bekas birokrat, dan kebanyakan di antara mereka kurang berkecimpung dalam hal ihwal adat istiadat, sehingga lembaga ini nyaris tidak mampu menampakkan sosoknya sebagai lembaga yang fungsinya antara lain membina dan mengembangkan adat istiadat. Bahkan cenderung menjadi lembaga yang lebih bernuatan

“politik musman”. Padahal, di Riau sangat banyak terjadi masalah-masalah yang kait mengait dengan adat, seperti masalah hak-hak adat, hak-hak hutan tanah wilayah, dan sebagainya. Permasalahan itu nyaris tidak ditangani oleh lembaga ini, sehingga masyarakat kehilangan naungan, kemudian mencari *“naungan”* atau *“pembela”* lain. Akibatnya, banyak anggota masyarakat adat yang terjebak oleh pihak lain, yang berpura-pura membela hak-hak rakyat padahal mencari keuntungan di atas derita rakyat itu. Karenanya tidaklah heran bila *“marwah”* lembaga ini tidak kokoh, bahkan cenderung diabaikan orang.

Kita juga melihat, bahwa lembaga yang vital ini *“hidup mati”*nya seakan tergantung kepada Pemda Riau, terutama mengenai pendanaan. Akibatnya, banyak sekali program lembaga ini yang mandul karena ketidakmampuan mencari dana sendiri. Padahal, sebagai lembaga yang memiliki jangkauan ke seluruh Riau, seharusnya lembaga ini mampu mencari dan menghimpun dana sendiri, dan mampu melaksanakan programnya tanpa terus menerus *“menyusu”* kepada Pemda Riau. Konon, karena ketiadaan dana itu pula maka lembaga ini sampai saat ini belum mampu mengadakan Mubesnya, walaupun masa jabatan kepengurusannya sudah lama berakhir.

Padahal, lembaga adat adalah satu-satunya kelembagaan yang penting dan tepat serta *“netral”* untuk berperan aktif membina dan mengembangkan adat istiadat khasnya, kebudayaan Melayu Riau umumnya. Sebab lembaga ini adalah milik semua masyarakat adat Melayu Riau, *tempat masyarakat meminta petuah dan amanah, tempat masyarakat meminta bantuan dalam menyelesaikan permasalahan adatnya, tempat masyarakat meminta bantuan membela hak-hak*

adatnyanya yang terampas dan sebagainya. Tetapi dengan kondisi seperti sekarang, jangan membela orang lain, mengurus diri sendiri saja nampaknya belum mampu. Karenanya, lembaga ini haruslah dibenahi kembali menurut alur dan patutnya, agar benar-benar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

03. *“Mengadakan pertemuan dari hati kehati”*, yakni pertemuan antar semua tokoh atau yang ditokohkan, untuk duduk dalam perbincangan mengenai nasib orang Melayu dan daerah Riau masa kini dan masa mendatang. Pertemuan ini, apapun namanya, diharapkan menghadirkan tokoh-tokoh Melayu di Riau secara kekeluargaan, dan masing-masing melepaskan dirinya dari jabatan, ikatan atau apapun *“baju”*nya. Mereka hadir benar-benar selaku orang Melayu Riau, yang *“berhutang budi”*, kepada Riau, yang merasa *“bertanggungjawab moral”* terhadap hari depan Riau, yang merasa Riau dalam arti luas adalah *“kampung halaman”*nya. Di dalam pertemuan kekeluargaan yang dilandasi oleh semangat *“persebatian melayu”* inilah masing-masing diberi kebebasan untuk menyampaikan *“suara hati nuraninya”* tanpa adanya kepentingan kelompok dan pribadi, tetapi semata-mata untuk kepentingan orang Melayu dan daerah Riau ini.

04. *“Membentuk Sekretariat Persebatian Melayu”*, yakni sekretariat bersama seluruh komponen Melayu, termasuk organisasi kemasyarakatan, atau siapa saja yang merasa dirinya *“orang Melayu”* tanpa memilah dan memilah asal usul, bentuk dan wujudnya, sesuai dengan asas dan acuan kemelayuan itu sendiri, yakni: *“seagama*

(Islam), seadat (sebudaya) Melayu dan sebahasa yakni bahasa Melayu”.

Melalui “*Sekretariat Persebatian Melayu*” ini pula diharapkan terjalinnya komunikasi antar semua komponen, sehingga berbagai permasalahan dapat dibahas dan dikaji secara bersama dalam suasana yang penuh kemelayuan, serta menghindarkan berkembangnya rasa “*kedaerahan yang sempit*”. Selanjutnya, keberadaan sekretariat ini dapat pula merumuskan “*kriteria putera daerah*”, sehingga tidak menjebak masing-masing kelompok menafsirkan secara sendiri-sendiri atau menafsirkannya untuk kepentingan semusim, sehingga menjadi rancu dan cenderung mempersempit wawasan kemelayuan itu sendiri.

Dari sisi lain, keberadaan “*Sekretariat Persebatian Melayu*” ini dapat dijadikan wadah untuk terjalinnya hubungan antara generasi tua dengan generasi muda Melayu, yang selama ini cenderung belum terjalin dengan baik. Akibatnya, dapat saja menimbulkan beragam prasangka antara kedua belah pihak, sehingga sangat melemahkan “*persebatian melayu*” di Riau ini. Padahal, generasi muda sebagai “*ahli waris*” daerah ini perlu mendapatkan masukan dari yang tua-tua, dan yang tua-tua pun perlu pula mendapatkan sumbangan fikiran dari yang muda-muda. Keserasian itulah barangkali dapat mengentalkan hubungan antara generasi tua dengan generasi mudanya, sehingga apapun rancangan yang digagas dan dilaksanakan dapat didukung oleh semua pihak. Dan dengan demikian pula berbagai permasalahan dan cabaran yang timbul dapat dihadapi secara bersama dan terpadu.

Persebatian antara generasi tua dengan generasi muda dianggap sangat penting, karena selama ini terasa adanya semacam “*kesenjangan*” hubungan, sehingga yang muda menganggap “*yang tua ingin terus akses dalam kerentaannya*”, dan yang tua menganggap “*yang muda cenderung melecehkannya*”. Bila anggapan ini tidak dipupus habis, tentulah tidak akan dapat mewujudkan “*persebatian melayu*”, dan tentulah harapan untuk mengangkat harkat dan martabat Melayu serta mensejahterakan hidup dan kehidupannya akan sulit dicapai.

Padahal, dengan mengacu kepada pengalaman selama ini, dengan merujuk kepada beragam peristiwa yang terjadi, sudah sepatutnyalah semua pihak menyadari bahwa “*kelemahan*” orang Melayu di Riau hakikatnya berpunca dari belum terwujudnya “*persebatian*” antara yang tua dengan yang muda, antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, antara satu kawasan dengan kawasan lainnya dan sebagainya.

V. PENUTUP

Apa yang disajikan ini semata-mata dilandasi oleh rasa tanggungjawab moral terhadap hari depan “*orang Melayu*” dan daerah Riau, yang semakin hari semakin menimbulkan “*kerisauan*” karena beragam permasalahan yang dihadapinya. Riau sekarang, dapat diibaratkan bagaikan gelanggang yang “*riuh rendah*” oleh pertarungan antar beragam kepentingan. Baik antar sesama orang Melayu, maupun antar pendatang dan antara orang Melayu dengan pendatang.

Dalam keriuhan itu, muncul berbagai ekses yang perlu dicemaskan, baik menyangkut krisis akhlak, krisis budaya, maupun krisis ekonomi dan politik. Menghadapi beragam krisis ini, perlulah dikekalkan "*persebatian melayu*", agar upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat, tuah dan marwah, kesejahteraan dan kerukunan umat dapat terwujud dengan sebaik-baiknya. Dengan persebatian itu, diharapkan agar orang-orang Melayu tidak terjebak ke dalam perangkap pihak lain yang ingin memanfaatkan "*kelemahan*" orang Melayu untuk "*memecah belah kemelayuan*" dan *menangguk di air keruh*.

Karenanya, kepada beliau-beliau yang dianggap "*tokoh*" atau merasa dirinya "*tokoh*" diharapkan untuk memandang jauh ke depan, menyimak secara arif dan bijak apa yang terjadi di Riau sekarang, dan berupaya membenahinya agar keriuhan itu tidak menjadi "*riuh rendah*" dan "*pecah belah*". Bila ada yang retak, cepat direkat supaya tidak membawa pecah. Bila ada yang sumbing, cepat diperbaiki agar tidak membawa belah. Bila ada yang genting, cepat ditampun agar tidak putus. Bila ada yang tembuk, cepat ditampal agar tidak koyak rabak. Bila ada yang keruh, cepat dijernihkan agar tidak dimanfaatkan orang lain untuk menangguk keuntungan. Bila ada yang kusut, cepat diselesaikan agar tidak menjadi kusut masai. Bila ada yang salah faham atau salah sangka atau "*bertelikai*", cepatlah saling maaf memaafkan, agar tidak menjadi "*musuh bebuyutan*". Bila ada permasalahan, cepatlah diselesaikan supaya tidak menjadi "*duri di dalam daging*" atau menjadi "*api di dalam sekam*" yang satu saat kelak akan membakar Riau ini.

Akhirnya kepada “*Yayasan Gaung*” selaku pihak penyelenggara, saya sampaikan penghargaan dan terima kasih, karena upaya ini diharapkan dapat kembali merekat “*persebatian melayu*” di Riau ini. Dan saya merasa bangga, karena kegiatan ini dilakukan oleh generasi muda Melayu, semoga semua generasi muda Melayu Riau dapat menjadi tumpuan Riau masa depan.

Pekanbaru, Mei 2000